



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSLAN ABDUL GANI**
2. Jabatan : **KEPALA PELAKSANA**
3. NHK : **93855**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 17.458.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 6291 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 806.000.000
5. Tanah Seluas 12640 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 6.320.000.000
6. Tanah Seluas 5250 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 682.500.000
7. Tanah Seluas 528 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 5128 m2/196875 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 103.150.071



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 17.661.650.071

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 17.661.650.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.